



Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapasari Kota Surabaya

Rahmita Dwi Yunisa¹, Abram Cristito Purba², Redianto Prasetyo Kurniawan³,
Oktarizka Reviandani⁴

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Budaya dan Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"
Jawa Timur, Indonesia
E-mail addresses: abrampurba1108@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 31, 2025

Revised June 11, 2025

Accepted June 30, 2025

Available online July 03, 2025

Kata Kunci:

Kelurahan Kapasari; Permukiman Kumuh; Strategi Penanganan

Keywords:

Handling Strategy; Kapasari Village; Slums



This is an open access article under the [CC BY SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Surabaya sebagai kota besar kedua di Indonesia menghadapi tantangan serius terkait permukiman kumuh, terutama di Kelurahan Kapasari yang terletak di Kecamatan Genteng. Dengan pertumbuhan penduduk yang mencapai 0,52% dan ketersediaan lahan yang terbatas, banyak penduduk berpendapatan rendah terpaksa tinggal di lingkungan yang tidak layak huni. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitas program yang telah diterapkan oleh pemerintah. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti bedah rumah dan penyediaan jamban, pelaksanaan sering terhambat oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, diharapkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Kapasari dapat meningkat secara signifikan.

ABSTRACT

Surabaya as the second major city in Indonesia faces serious challenges related to slums, especially in Kapasari Urban Village located in Genteng Sub-district. With population growth reaching 0.52% and limited land availability, many low-income residents are forced to live in uninhabitable environments. This study aims to examine the slum upgrading strategy in Kelurahan Kapasari, identify the constraints faced, and assess the effectiveness of the programs that have been implemented by the government. The method used is qualitative with data collection through interviews, observation, and documentation. The results show that although the government has implemented various programs such as house renovation and latrine provision, implementation is often hampered by budget limitations and lack of coordination. Therefore, a more integrated and sustainable strategy is needed, as well as increased community participation in these programs. With the right strategic measures, it is expected that the quality of settlements and community welfare in Kelurahan Kapasari can improve significantly.

1. PENDAHULUAN

Surabaya adalah kota besar kedua di Indonesia dan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur. Sebagai kota besar Surabaya memiliki pertumbuhan penduduk yang tinggi sebesar 0.52% akan tetapi pertumbuhan penduduk ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan tempat tinggal yang memadai. Hal ini membuat orang-orang

dengan pendapatan rendah tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak, sehingga mereka membangun rumah di tempat yang tidak layak huni. Pada akhirnya, permukiman kumuh terbentuk karena masalah ini (Ghifari, 2021).

Menurut Kartika Puspa Dewi (2019), permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni atau ditinggali yang memiliki beberapa karakteristik yaitu terletak di lahan yang tidak diperuntukan untuk ditinggali, memiliki kepadatan bangunan tempat tinggal yang sangat tinggi, rentan terhadap konflik dan masalah sosial, tempat sarang penyakit, dan kualitas bangunan yang buruk. Beberapa dampak juga ditimbulkan dari adanya permukiman kumuh seperti penurunan tingkat kesehatan masyarakat sebagai akibat dari tinggal di daerah yang tidak sehat, frekuensi kebakaran yang meningkat, dan konflik sosial yang tinggi (Ghifari, 2021)

Surabaya Pusat merupakan wilayah yang memiliki kepadatan tinggi, hal ini dapat dilihat dari ketidakseimbangan antara luas wilayah dan jumlah kepadatan penduduk yang ada. Kelurahan Kapasari merupakan salah satu wilayah kumuh yang terdapat di Pusat Kota Surabaya, sebagian lokasinya berada di bantaran rel kereta api dan menjadi salah satu kelurahan di Kecamatan Genteng yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi (Rachman et al., 2023).

Tabel 1. Kepadatan penduduk kelurahan di Kecamatan Genteng 2023

Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ² .)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Embong Kaliasin	20,40	9.217	97,9
Ketabang	12,59	6.723	92,5
Genteng	14,29	15.262	96,0
Peneleh	24,07	24.380	94,2
Kapasari	28,65	29.529	98,0
Kecamatan Genteng	100,00	14.328	96,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2023

Tabel 2. Kepadatan penduduk kelurahan di Kecamatan Genteng 2023

Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per km ² .)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Embong Kaliasin	20,40	9.217	97,9
Ketabang	12,59	6.723	92,5
Genteng	14,29	15.262	96,0
Peneleh	24,07	24.380	94,2
Kapasari	28,65	29.529	98,0
Kecamatan Genteng	100,00	14.328	96,0

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2023

Berdasarkan data di atas, Kelurahan Kapasari menempati peringkat keempat dari lima kelurahan di Kecamatan Genteng dalam hal luas wilayah. Namun, dari segi

kepadatan penduduk Kelurahan Kapasari justru berada di peringkat pertama. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun luas wilayahnya relatif kecil, jumlah penduduk di Kelurahan Kapasari sangat tinggi. Bangunan kumuh di Kelurahan Kapasari sebesar 3,79 Ha yang tersebar di 3 RW yaitu RW 4, 5, dan 9. Permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari berada pada kawasan sekitar jalur rel kereta api menuju Stasiun Semut yang berada pada RW 4 dan 5, karakteristik bangunan yaitu padat, berdekatan, tidak memiliki RTH dan jalan sempit. Tingkat pendidikan di kawasan ini didominasi oleh SD dan SLTP/ sederajat (Wardhana et al., 2016).

Sebagian besar penduduk permukiman kumuh Kelurahan Kapasari adalah pendatang dengan keterampilan dan tingkat pendidikan yang rendah. Penduduk di permukiman kumuh pinggiran rel rata-rata memiliki mata pencaharian sebagai pedagang yang penghasilannya hanya untuk kebutuhan sehari-hari (Wardhana et al., 2016). Mereka memilih tinggal di Kapasari karena lokasinya strategis di pusat kota sesuai untuk penduduk dengan mata pencaharian sebagai pedagang, akan tetapi pusat kota yang semestinya menjadi wajah utama sebuah daerah tidak seharusnya ada permukiman kumuh. Pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kota Surabaya telah berupaya mengatasi permasalahan di Kelurahan Kapasari melalui berbagai program revitalisasi kawasan kumuh, khususnya perbaikan infrastruktur. Salah satu program yang dijalankan adalah bedah rumah yang memberikan bantuan bagi warga dengan hunian tidak layak, perbaikan jalan, sistem drainase, serta fasilitas umum seperti toilet juga menjadi perhatian utama. Namun tantangan terbesar dalam pelaksanaan program-program ini adalah menjaga konsistensi dan kesinambungannya. Banyak program pemerintah yang terhenti di tengah jalan akibat keterbatasan anggaran atau kurangnya koordinasi yang optimal antara pemerintah dan masyarakat (Juwariyah, 2024).

Adapun penelitian terdahulu tentang permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari yang kami gunakan sebagai bahan acuan menurut Nizar Harsya Wardhana dan Dr. Ing. Ir. Haryo Sulistyarso (2015), yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng Kota Surabaya", menjelaskan bahwa permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari berada di wilayah pinggiran rel (squatter area) dan pusat kota (slum area). Berdasarkan survei responden yang dilakukan faktor penyebab kekumuhan di squatter area dan slum area yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor lingkungan, dan faktor dukungan pemerintah.

Penelitian sebelumnya belum secara mendalam membahas strategi dan program yang telah maupun akan dijalankan oleh pemerintah dalam menangani permasalahan kekumuhan. Permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari perlu segera ditangani, mengingat keberadaan permukiman kumuh di wilayah ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan berbeda melalui teori yang dikemukakan oleh Salusu dan Young (2015), yang mencakup lima indikator utama, yaitu: 1) Tujuan dan Sasaran; 2) Lingkungan; 3) Kemampuan Internal; 4) Pembuat Strategi; serta 5) Komunikasi (Zahra et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, serta menilai efektivitas program yang telah di terapkan. Dengan

demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas permukiman dan kesejahteraan masyarakat wilayah tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif untuk menganalisa strategi pemerintah dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari. Metode ini juga memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang mendalam dan terperinci melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta penggunaan berbagai sumber fisik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif (Zahra et al., 2025). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari, mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi, serta mengevaluasi efektivitas program yang telah dilaksanakan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi, baik yang telah dilakukan pemerintah maupun strategi yang akan dijalankan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah permukiman kumuh di Kapasari. Lokasi penelitian pada Kelurahan Kapasari dipilih berdasarkan pertimbangan terdapat kawasan permukiman kumuh dan terdapat masalah program penanganan yang tidak terselesaikan dengan optimal di Kelurahan tersebut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan para ahli yang terlibat untuk mengumpulkan informasi guna menyelesaikan permasalahan di wilayah penelitian berdasarkan fakta empiris (Regem et al., 2024). Observasi dapat dilakukan dengan pengamatan langsung kondisi permukiman. Dokumentasi dapat diperoleh dari berbagai dokumen tertulis dan visual, seperti surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan sumber dokumentasi lainnya (Gabriel Dave Ponto et al., 2022). Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur untuk memperoleh informasi secara terbuka dan mendalam. Sebanyak 10 responden dipilih secara acak menggunakan metode simple random sampling, yang memungkinkan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Responden ini mewakili 10 orang di Kelurahan Kapasari. Metode ini umumnya diterapkan pada populasi yang bersifat homogen (Sugiyono, 2012).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dengan warga setempat, serta studi pustaka sesuai kebutuhan penelitian. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, dokumen resmi pemerintah, dan peraturan perundang-undangan yang relevan (Gabriel Dave Ponto et al., 2022). Menggunakan pendekatan kualitatif, data dianalisis secara deskriptif dengan penyusunan dalam bentuk narasi terperinci. Teknik analisis yang digunakan merujuk pada model interaktif (Miles dan Huberman, 1992), yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Kapasari merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Genteng Kota Surabaya. Menurut data dari Kelurahan Kapasari (2025) luas Kelurahan Kapasari yakni 3,79 Ha yang terdiri dari 11 RW dan 64 RT.

Sedangkan jumlah penduduk di Kelurahan Kapasari sebesar 16.671 jiwa yang terdiri dari 8.265 laki laki dan 8.406 perempuan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara luas wilayah dan tingginya jumlah jiwa sangat tinggi yang menyebabkan kekumuhan.



Gambar 1. Permukiman di Pinggiran Rel Kereta Api RW 4 Kelurahan Kapasari, 2025

Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2025

Pada Kelurahan Kapasari terdapat beberapa RT yang dapat dikatakan permukiman kumuh karena terletak di bantaran rel kereta api yaitu RT 7,8,9, dan 10 yang terletak di RW 4. Kepemilikan tanah di Kelurahan Kapasari juga masi banyak yang dimiliki oleh pemerintah, contohnya tanah yang berada di bantaran rel kereta masih dimiliki oleh PJKA dan tanah yang berada di dekat kali masih dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air. Para pemilik rumah yang berada di atas tanah pemerintah ini hanya sebagian saja yang membayar PBB, sedangkan lainnya hanya membayar listrik dan air.

Tabel 3. Rekap Penerima Bantuan Kelurahan Kapasari Dari Tahun 2022 - 2025

Rekap Penerima Bantuan Kelurahan Kapasari Dari Tahun 2022 - 2025	
Modal Usaha Dinas Sosial	36 Penerima
Rombong BAZNAS	20 Penerima
Mesin Jahit BAZNAS	3 Penerima
Alat Kesehatan (Kursi Roda, Kaki Palsu, Tongkat Jalan, Alat Bantu Dengar, dll)	50 Penerima
Rutilahu (Rumah Tidak Layah Huni)	10 Penerima

Sumber : Kelurahan Kapasari 2025

Selama periode tahun 2022 hingga 2025, Kelurahan Kapasari telah menerima berbagai bentuk bantuan sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial dan BAZNAS. Bantuan tersebut meliputi modal usaha dari Dinas Sosial yang diberikan kepada 36 penerima, serta program pemberdayaan ekonomi dari BAZNAS berupa bantuan

rombong kepada 20 penerima dan mesin jahit kepada 3 penerima. Selain itu, terdapat pula bantuan alat kesehatan seperti kursi roda, kaki palsu, tongkat jalan, alat bantu dengar, dan lainnya yang telah disalurkan kepada 50 penerima. Untuk mendukung kelayakan tempat tinggal, sebanyak 10 warga menerima bantuan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Bantuan-bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat kemandirian ekonomi warga Kapasari.

Untuk mengatasi permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari diperlukan strategi dari pemerintah, menurut Salusu dan Young (2015) terdapat beberapa komponen-komponen strategi, antara lain :

1. *Tujuan dan Sasaran*

Menurut Harvey (1992), tujuan merupakan harapan atau keinginan yang ingin diraih di masa depan yang disusun secara umum, belum terperinci, dan tidak memiliki batasan waktu yang jelas. Sementara itu, sasaran merupakan rumusan yang lebih spesifik dan dapat diimplementasikan, menggambarkan tindakan atau langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Sasaran memiliki karakteristik yang terukur, dibatasi oleh waktu, dan dapat dievaluasi secara kuantitatif. Tujuan dan sasaran pada program pengentasan permukiman kumuh di Kota Surabaya terutama pada Kelurahan Kapasari harus jelas sehingga pada pelaksanaannya dapat meningkatkan kualitas sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di kawasan permukiman kumuh agar lebih layak dan sejahtera.

Berpacu pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2018 bahwa tujuan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi permukiman kumuh adalah untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru di Kota Surabaya serta meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman kumuh yang sudah ada agar menjadi lingkungan yang lebih layak huni, sehat, aman, dan nyaman. Sedangkan sasaran yang sesuai dengan tujuan dari peraturan tersebut yakni perbaikan fisik permukiman kumuh, termasuk perbaikan sarana dan prasarana seperti drainase, jalan lingkungan, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya.

Pemerintah Kota Surabaya telah mengambil langkah untuk mengatasi masalah permukiman kumuh, salah satunya di Kelurahan Kapasari, melalui program pengadaan jamban dan bedah rumah. Pengadaan jamban ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 115 Tahun 2022, yang ditujukan bagi warga yang tidak memiliki jamban serta masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program ini melibatkan kerjasama antara Baznas, Dinas PRKP Cipta Karya, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Sementara itu, untuk program bedah rumah di Kelurahan Kapasari, pelaksanaannya dilakukan oleh Baznas. Baznas memberikan bantuan renovasi kepada rumah-rumah yang tidak memiliki sertifikat atau dokumen resmi. Prosedur bedah rumah dimulai dengan penentuan rumah yang akan direnovasi oleh pihak Kelurahan Kapasari atau pemilik rumah dapat mengajukan permohonan ke kelurahan. Setelah itu, kelurahan akan melakukan survei ke lokasi sebelum melaporkan hasilnya kepada Baznas.

Dalam penanganan permukiman kumuh, perangkat Kelurahan Kapasari berperan aktif dalam mendukung kesuksesan program yang dijalankan. Salah satu bentuk keterlibatan mereka adalah dengan melakukan pendataan terhadap warga yang tempat tinggalnya memerlukan bantuan, seperti kebutuhan akan jamban dan bedah rumah. Peran ini sangat penting karena kelurahan merupakan jenjang

pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga mereka lebih mudah mengenali kondisi lingkungan serta permasalahan yang dihadapi oleh warga di kawasan permukiman kumuh.

2. *Lingkungan*

Lingkungan menurut Shirley (1978) terdiri atas dua jenis, yaitu lingkungan makro yang melibatkan masyarakat dan lingkungan mikro yang ada di dalam organisasi. Manusia dan lingkungan ini saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Komunikasi memegang peranan penting dalam strategi, di mana komunikasi yang efektif dapat mendukung pencapaian tujuan strategi yang diinginkan. Jika strategi yang dilakukan mendapatkan informasi yang tidak lengkap, hal ini akan berdampak pada keberhasilan yang dicapai. Tujuan dari analisis lingkungan eksternal adalah untuk membantu organisasi dalam mengenali peluang dan ancaman yang ada di sekelilingnya. Melalui proses ini, organisasi bisa merancang strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan dan sekaligus memanfaatkan peluang demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan (Thompson A. et al., 2019).

Faktor lingkungan memainkan peran yang signifikan dalam mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan berbagai program di Kelurahan Kapasari. Respon positif masyarakat terhadap berbagai program yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat maupun pemerintah menunjukkan adanya harapan untuk memperoleh manfaat yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Program-program seperti bantuan pembangunan rumah, modal usaha, rombongan untuk berjualan, alat kesehatan, dan mesin jahit menjadi wujud konkret dari upaya pemberdayaan masyarakat. Masyarakat secara umum mendukung inisiatif ini, karena diharapkan dapat memberikan dampak positif, terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi terbatas.

Namun, antusiasme yang tinggi terhadap program-program tersebut kadang memunculkan keluhan dari sebagian masyarakat yang merasa iri karena tidak memperoleh bantuan, meskipun bantuan tersebut ditujukan kepada warga yang kurang mampu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial (Dinsos). Kelurahan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran bantuan biasanya menanggapi hal ini dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. Setelah diberikan penjelasan tentang tujuan program dan kriteria penerima bantuan, sebagian besar warga akhirnya menerima, meskipun ada pula yang tetap tidak puas. Edukasi ini penting agar masyarakat memahami bahwa bantuan disalurkan sesuai dengan prioritas dan data yang sudah diverifikasi oleh Dinsos, serta untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

3. *Kemampuan Internal*

Kemampuan adalah suatu gambaran yang ada pada organisasi karena seluruh kegiatan fokus pada kekuatan organisasi tersebut. Kemampuan internal ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, dan nilai-nilai. Secara konseptual dalam organisasi ini biasanya kemampuan tertinggi dimiliki oleh seorang pemimpin (Zahra et al., 2025).

Kelurahan Kapasari memiliki empat bidang yang masing-masing memiliki peran penting dalam pelaksanaan strategi bantuan sosial. Keempat bidang tersebut adalah bidang Sekretariat, Kesra, Perekonomian, serta Bangtub dan Administrasi

Kependudukan. Setiap bidang memiliki fungsi yang saling terkait untuk memastikan kelancaran distribusi program bantuan.

Bidang Kesra merupakan pihak pertama yang menerima informasi terkait program bantuan dan menjadi titik awal dalam proses penerimaan bantuan sosial. Setelah itu, bidang Sekretariat menyusun surat resmi yang disampaikan kepada RT dan RW untuk memberi tahu bahwa ada program bantuan yang akan diberikan kepada warga. Selanjutnya, bidang Bangtub turun ke lapangan untuk memastikan bahwa warga yang tercatat dalam data penerima bantuan benar-benar masih berdomisili di Kelurahan Kapasari. Proses verifikasi lapangan ini penting untuk mencegah adanya ketidaksesuaian data dan memastikan bantuan sampai kepada mereka yang berhak. Sementara itu, bidang Administrasi Kependudukan bertanggung jawab untuk memeriksa status kependudukan setiap warga penerima bantuan, guna memastikan bahwa mereka terdaftar dengan sah sebagai warga yang berhak menerima bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sinergi antara keempat bidang ini memastikan bahwa distribusi bantuan sosial berjalan dengan efisien dan tepat sasaran.

4. *Pembuat Strategi*

Peran pembuat strategi menjadi aspek krusial dalam keberhasilan sebuah program, karena mereka bertanggung jawab dalam merancang arah kebijakan dan memastikan keterlibatan aktor yang relevan. Dalam konteks ini, pembuat strategi tidak hanya menunjuk pihak-pihak yang kompeten dalam pelaksanaan teknis, tetapi juga menetapkan dasar strategi yang berkelanjutan untuk mendukung kelangsungan organisasi. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peranan pemimpin, yang memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan sasaran organisasi, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Kepemimpinan yang visioner dan strategis menjadi fondasi dalam memastikan bahwa program seperti pembangunan jamban, bedah rumah, hingga bantuan sosial lainnya berjalan secara terarah dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain koordinasi dengan perangkat kelurahan dan kecamatan, program-program yang digagas oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) juga melibatkan kerja sama lintas sektor guna memastikan efektivitas pelaksanaan dan pencapaian sasaran. Salah satu program utama yang sedang berjalan adalah pembangunan jamban, yang merupakan hasil kolaborasi antara Baznas, Dinas Kesehatan (Dinkes), Koramil, serta Kelurahan.

Baznas berperan sebagai pemberi dana utama dalam pembangunan jamban. Dana yang disalurkan kemudian dikelola langsung oleh pihak kelurahan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Selain itu, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan teknis juga telah diatur secara transparan guna memastikan akuntabilitas program. Dinas Kesehatan dilibatkan untuk memberikan masukan teknis terhadap standar sanitasi dan kesehatan lingkungan agar fasilitas jamban yang dibangun memenuhi kriteria kelayakan kesehatan. Sedangkan Koramil turut memberikan dukungan tenaga kerja dalam pelaksanaan fisik pembangunan.

Koordinasi juga melibatkan konsistensi pelaksanaan dengan rencana pembangunan kelurahan, agar kegiatan yang dilakukan tidak tumpang tindih dengan program lain yang tengah berlangsung di wilayah tersebut. Dalam hal ini, peran Kelurahan menjadi penghubung utama antara pelaksana di lapangan dengan Baznas sebagai penyedia dana, sekaligus bertindak sebagai penanggung jawab

administratif dan pelaporan. Selain pembangun jamban, Baznas juga menggagas sejumlah program lain seperti: Rombong Usaha bagi pelaku UMKM, Tebus Ijazah hingga 75%, Biaya pendidikan bagi penyandang disabilitas, Program bedah rumah, Bantuan alat bantu seperti kursi roda, kaki palsu, dan Bantuan kebutuhan khusus seperti pampers. Program-program tersebut disalurkan melalui pendekatan berbasis kebutuhan masyarakat yang datanya dikumpulkan oleh kelurahan, lalu diverifikasi bersama tim Baznas. Sementara itu, program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) saat ini juga sedang berlangsung, khususnya di wilayah RW 5. Dalam program ini, proses penentuan penerima manfaat dilakukan oleh Cipta Karya melalui koordinasi dengan Kelurahan dan lembaga terkait, dengan mengacu pada data dan kondisi aktual di lapangan.

Koordinasi lintas sektor antara Baznas, Dinkes, Koramil, Kelurahan, dan pihak-pihak teknis lainnya merupakan strategi yang digunakan untuk menjaga agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Komunikasi yang intensif, pelaporan berkala, serta pelibatan berbagai pemangku kepentingan menjadikan model pelaksanaan program Baznas sebagai contoh sinergi kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat secara komprehensif.

5. *Komunikasi*

Dinas Sosial menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui struktur RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga) dalam proses pendataan dan penyaluran bantuan sosial. Proses ini diawali dari tingkat RW, di mana nama-nama warga yang berhak menerima bantuan didata secara terstruktur, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Setiap RW bertanggung jawab untuk memastikan bahwa daftar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Penentuan penerima bantuan didasarkan pada indikator Gamis Pramis Sejahtera yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial. Indikator ini tidak hanya berasal dari pemerintah daerah, tetapi juga mengacu pada ketentuan dari pemerintah provinsi dan kementerian terkait. Terdapat 99 indikator yang digunakan untuk menilai kelayakan penerima bantuan, dan untuk memastikan akurasi data, staf Dinas Sosial turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi satu per satu.

Efisiensi dalam penyaluran bantuan juga menjadi perhatian utama. Sebagai contoh, dahulu surat keterangan miskin (SKTM) dapat dibuat di kelurahan dan hampir semua permohonan di-ACC tanpa verifikasi ketat. Namun, sejak tahun 2019, kewenangan pembuatan SKTM dialihkan sepenuhnya ke Dinas Sosial. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hanya warga yang benar-benar membutuhkan yang mendapatkan bantuan, serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan data.

Melalui sinergi antara Dinas Sosial, RT, RW, serta perangkat kelurahan, proses penyaluran bantuan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Komunikasi yang efektif antara seluruh pihak terkait juga memastikan bahwa setiap hambatan yang muncul di lapangan dapat segera diatasi, sehingga bantuan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

4. **SIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan

Kelurahan Kapasari masih memiliki tantangan dalam pengelolaan kawasan kumuh sehingga masih menjadi permukiman kumuh yang cukup parah. Wilayah ini menghadapi masalah kepadatan penduduk yang tinggi pada lahan terbatas, dengan mayoritas penduduk berasal dari kalangan pendatang berpendidikan dan berketerampilan rendah, sehingga tinggal di lingkungan tidak layak huni.

Pemerintah Kota Surabaya telah melaksanakan berbagai program, seperti bedah rumah, penyediaan jamban, dan bantuan sosial. Namun, pelaksanaan program sering terkendala oleh keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi, sehingga keberlanjutannya belum optimal. Partisipasi masyarakat dan edukasi mengenai program menjadi penting untuk mencegah konflik sosial akibat distribusi bantuan yang dianggap tidak merata.

Komunikasi dan koordinasi lintas sektor perlu diperkuat agar program tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, disertai peningkatan kapasitas pemerintah serta pelibatan aktif masyarakat. Dengan langkah ini, diharapkan kualitas permukiman dan kesejahteraan warga Kapasari dapat meningkat secara signifikan.

Saran

Untuk meningkatkan kualitas permukiman di Kelurahan Kapasari, dibutuhkan langkah-langkah strategis guna memperkuat efektivitas program penanganan kawasan kumuh. Salah satunya adalah peningkatan koordinasi antar lembaga dan sektor, agar program yang dijalankan lebih sinergis dan tidak tumpang tindih.

Pemerintah juga perlu memperkuat edukasi masyarakat mengenai kriteria penerima bantuan dan tujuan program, guna mengurangi ketidakpuasan serta mendorong partisipasi aktif warga. Di samping itu, sistem monitoring dan evaluasi harus ditingkatkan agar efektivitas program dapat diukur dan hambatan dapat diidentifikasi sejak dini.

Selanjutnya, perencanaan program harus bersifat berkelanjutan, tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Terakhir, perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, sanitasi, dan fasilitas umum perlu menjadi prioritas untuk mendukung peningkatan kualitas hidup warga. Melalui lima langkah ini koordinasi, edukasi, evaluasi, keberlanjutan program, dan perbaikan infrastruktur diharapkan kondisi permukiman kumuh di Kelurahan Kapasari dapat ditangani secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- As' ari, R., & Fadjarajani, S. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 15(1).
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). Data Luas daerah Kecamatan Genteng Kota Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. (2023). Data Kepadatan penduduk kelurahan di Kecamatan Genteng Kota Surabaya.
- Gabriel Dave Ponto, Sofia E. Pangemanan, & Ventje Kasenda. (2022). Strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman

- Kumuh di Kecamatan Singkil Kota Manado (Studi Kasus di Kelurahan Kombos Timur). *1JURNAL GOVERNANCE*, Vol.2, No. 1.
- Ghifari, M. K. (2021). Implementasi Kebijakan Permukiman Kumuh di Kota Surabaya (Studi Kasus Permukiman kumuh di sekitar Sungai Kelurahan Asemrowo). *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(2), 26-33.
- Ibrahim, T. (2022). Strategi Pemerintah Kecamatan Langensari Dalam Pencegahan Covid-19. *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 93-102.
- Juwariah, D. (2024). Kapasari Surabaya Kumuh dan Terpinggirkan. Retrieved from <https://mojok.co/terminal/kelurahan-kapasari-kawasan-kumuh-yang-terpinggirkan-di-jantung-surabaya/>
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru. Jakarta: UIP.
- Rachman, D. T., Handoyo, P., & Harianto, S. (2023). Perubahan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Pemukiman Kumuh Akibat Urbanisasi di Kota Surabaya. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 8(2), 123-130.
- Regem, E., Surya, B., & Syafri, S. (2024). Strategi Penataan dan Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh di Sempadan Sungai Kelay Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. *Urban and Regional Studies Journal*, 6(2). <https://doi.org/10.35965/ursj.v6i2.4522>
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
- Wardhana, N. H., & Sulistyarso, H. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Kekumuhan Di Kelurahan Kapasari Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 4(2), C150-C154.
- Zahra, N. A., & Yulyana, E. (2025). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Bekasi (Studi Kasus pada Kelurahan Medan Satria). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(1), 41-62.
- Tivany, S. E., & Anisykurlillah, R. (2025). Strategi Menurunkan Angka Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Operasi Zebra Semeru oleh Biro Operasi Polda Jawa Timur. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 270-282.